

**TEKANAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, BUDAYA ORGANISASI,
KOMPETENSI, GAYA KEPEMIMPINAN, PERILAKU TIDAK ETIS TERHADAP
POTENSI FRAUD DANA DESA DI KABUPATEN BOYOLALI**

Alfian Indra Ningrum¹, Banu Witono², Zulfikar³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana Magister Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: alfianindraa9@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the influence of pressure, internal control systems, organizational culture, competence, leadership style, and unethical behavior on the potential for village fund fraud in Boyolali Regency. Using a quantitative approach, data were collected from a sample of village officials through convenience sampling techniques. The data were analyzed using multiple regression analysis. The results of the study indicate that pressure has a positive influence on the potential for village fund fraud; internal control systems have a significant negative influence on the potential for village fund fraud; organizational culture does not have a significant influence on the potential for village fund fraud; competence has a negative influence on the potential for village fund fraud; leadership style has no influence on the potential for village fund fraud; and unethical behavior has a positive influence on the potential for village fund fraud.

Keywords: *pressure, internal control system, organizational culture, competence, leadership style, unethical behavior, fraud.*

1. PENDAHULUAN

Menurut catatan Indonesian Corruption Watch (ICW) setiap tahun menunjukkan fenomena mengkhawatirkan terkait dengan desa. Korupsi di level desa konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh aparat penegak hukum sejak 2015-2021. Sepanjang tujuh tahun tersebut, terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar. Korupsi yang makin meningkat di desa berjalan beriringan dengan peningkatan alokasi dana yang cukup besar untuk membangun desa. Sejak tahun 2015 sampai 2021, Rp 400,1 triliun dana desa telah diberikan untuk keperluan pembangunan desa, baik dalam hal pembangunan fisik maupun manusia melalui program pengembangan masyarakat dan penanganan kemiskinan ekstrim. Korupsi yang terjadi di desa akan berdampak pada kerugian yang dialami langsung oleh masyarakat desa. ACFE (2024) menyebutkan bahwa fenomena terjadinya korupsi di berbagai daerah di dunia cukup bervariasi dan mencerminkan faktor seperti norma budaya mengenai larangan melakukan korupsi. Budaya adalah nilai-nilai yang dipercaya setiap anggota dari sebuah kelompok, sehingga perilaku seseorang dapat diketahui dari budaya yang dijalankan.

Pada sektor pemerintahan, fraud telah menyebabkan banyak kerugian khususnya bagi masyarakat. Penyuapan, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan aset negara, sampai pemerasan merupakan bentuk dari fraud yang terjadi di sektor publik. Hal ini dibuktikan dari kasus korupsi dengan berbagai bentuk penyimpangan pada sektor pemerintahan. Penyimpangan tersebut tentunya sangat merugikan keuangan negara yang sangat besar sehingga masyarakat sangat dirugika (Donelson et al., 2017). Briando et al., (2020) berpendapat bahwa bentuk perilaku tidak etis dalam lingkup sektor publik atau pemerintahan adalah perilaku fraud yang terdiri dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi. Salah satu perilaku fraud yang terjadi di Indonesia yang melibatkan legislator daerah adalah tertangkapnya 41 anggota DPRD

Kota Malang sebagai tersangka suap pada tahun 2018. Selain itu, terdapat indikasi perilaku fraud di ranah eksekutif yang dilakukan oleh tiga bupati di Jawa Barat pada tahun 2019. Kedua kasus tersebut menyiratkan bahwa hingga saat ini perilaku fraud di Indonesia masih terus terjadi.

Istilah fraud atau kecurangan merupakan perilaku seseorang untuk berbuat kesalahan yang disengaja dalam rangka memenuhi tujuan dan manfaat pribadi. Dalam akuntansi, konsep fraud termasuk tindakan yang menyimpang dari prosedur atau standar akuntansi yang sebagaimana harus diterapkan dalam sebuah entitas. Sedangkan apabila yang dimaksud dengan fraud pengelolaan dana desa, berarti tindak kecurangan atau penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa (Suryandari & Valentin, 2021).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori keagenan berlandaskan hubungan sebagai sebuah kesepakatan antara pemilik perusahaan (principal) dengan pengelola perusahaan (agent). Hubungan keagenan terjadi saat seseorang atau beberapa orang memberikan pekerjaan kepada orang lain untuk memperoleh jasa dari pekerja tersebut dan kemudian memberikan tugas dalam pengambilan keputusan kepada pekerja.

Kecurangan (Fraud)

ACFE (2016) melalui Survei Fraud Indonesia tahun 2016 menyatakan bahwa kecurangan adalah tindakan melawan hukum secara sengaja untuk suatu tujuan tertentu (misalnya memanipulasi atau menyajikan laporan yang keliru kepada pihak lain) dan dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dan dapat merugikan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tekanan

Tekanan merupakan dorongan atau motivasi individu untuk terlibat dalam kecurangan. Faktor tekanan yang mendorong kecurangan di pemerintah daerah dapat dikaitkan dengan tingkat kemandirian suatu daerah. Secara mengejutkan, pemerintah daerah yang mandiri secara finansial justru cenderung mengalami tekanan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam kecurangan. Hal ini disebabkan oleh penilaian kinerja pemerintah daerah yang seringkali terkait dengan penggunaan anggaran. Keadaan surplus sering dianggap sebagai indikator bahwa pemerintah daerah tidak beroperasi secara optimal dalam memberikan layanan publik.

Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menjelaskan sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Budaya Organisasi

Menurut Hodgetts Richard M dan Fred Luthan dalam Tobari (2015:46) budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai-nilai, filosofi, aturan-aturan dan iklim kerja pegawai. Hal ini tidak jauh berbeda yang dijelaskan oleh Sarplin budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Sutrisno (2018:2) menjelaskan budaya organisasi adalah suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja.

Kompetensi

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi adalah karakteristik perilaku

yang menggambarkan motif, sifat, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Unsur-unsur kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku (Hafied, 2016:42).

Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk membimbing, memengaruhi, mendorong, dan mengendalikan orang lain atau bawahan agar melaksanakan tugas dengan kesadaran dan sukarela demi mencapai tujuan tertentu (Widhiani, 2021). Salah satu faktor yang penting bagi keberhasilan organisasi adalah kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk membina dan menjadi teladan bagi seluruh karyawannya dengan caracara yang positif. Kepemimpinan dapat membuat perbedaan dalam menciptakan budaya organisasi yang etis atau tidak etis.

Perilaku Tidak Etis

Perilaku tidak etis ialah segala perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan merupakan perilaku yang tidak dapat diterima dalam lingkungan masyarakat serta mengarah pada hal-hal yang tidak bermanfaat justru akan merugikan serta membahayakan diri sendiri dan orang lain (Griffin, R., & Ebert, 2006). Perilaku tidak etis juga bisa disebut sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam karena melanggar norma agama, sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga manajemen dengan tingkat perilaku etis yang tinggi akan senantiasa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tugas pokok yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti melakukan kecurangan dengan menyalahgunakan kekuasaan dan menyalahgunakan sumber daya organisasi (Nadia & Purnawati., 2022).

Pengelolaan Dana Desa

Menurut (H', 2018) mendefenisikan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

Pengembangan Hipotesis

Tekanan terhadap *Fraud Hexagon*

Tekanan adalah sebuah desakan untuk berbuat sesuatu yang tidak semestinya atau menyimpang, dikarenakan adanya tekanan baik berasal dalam pribadi individu maupun yang berasal dari luar. Menurut Albretch (2012), semakin besar tekanan yang dirasakan oleh seseorang, maka akan semakin besar pula kemungkinan terjadinya fraud.

Dalam pengelolaan dana desa, adanya tekanan yang dirasakan oleh aparatur desa membuatnya menjadi terpacu untuk melakukan fraud. Tekanan yang dimaksud dapat berupa kebutuhan keluarga yang mendesak, tekanan target pekerjaan, merasa frustrasi dengan pekerjaan, dan merasa dirinya layak memperoleh imbalan (berasal dari eksternal individu).

H1: Tekanan berpengaruh positif terhadap potensi fraud pengelolaan dana desa.

Sistem Pengendalian Internal terhadap potensi fraud pengelolaan dana desa

Sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga atau organisasi serta memiliki peran yang penting di dalam pencegahan dan pendeteksian adanya tindakan fraud atau kecurangan. Pengendalian internal harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas yang bertujuan agar dapat menjamin dan menyediakan laporan informasi keuangan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Wardani dan Ika, 2017) dalam Laksmi & Sujana (2019) Dengan adanya sistem pengendalian internal maka proses pengelolaan keuangan desa dapat diarahkan, diawasi dan

dapat dideteksi apabila terdapat penyelewengan sehingga laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan Laksmi & Sujana, (2019).

H2: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap fraud pengelolaan dana desa.

Budaya Organisasi terhadap potensi fraud pengelolaan dana desa

Budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi dalam melakukan aktivitasnya baik yang diperuntukkan bagi karyawan maupun untuk kepentingan orang lain. Dihubungkan dengan permasalahan kecurangan, salah satu faktor yang bisa mencegah kecurangan menurut Arens (2008) dalam Widiyarta, Herawati, dan Atmadja (2017) adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi.

H3: Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap potensi *fraud* pengelolaan dana desa.

Kompetensi positif terhadap potensi *fraud* pengelolaan dana desa.

Menurut Pasal 13, Pasal 1 (10) UU Ketenagakerjaan 2003, kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bekerja, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional menurut kriteria yang ditetapkan. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai segala kemampuan dan pemahaman seseorang dalam bekerja. Jumlah anggaran Dana Desa yang besar menuntut kemampuan mumpuni dari setiap aparatur desa. Orang yang kompeten juga identik dengan jabatan tinggi sehingga jika terjadi kecurangan dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah menyelewengkan jabatannya.

H4: Kompetensi berpengaruh positif terhadap fraud pengelolaan dana desa.

Gaya Kepemimpinan terhadap fraud pengelolaan dana desa.

Gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai ciri khas yang meliputi cara-cara yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk membimbing bawahannya agar dapat mencapai tujuan organisasi. Kepala Desa memiliki peran penting untuk memajukan desa, namun program kerja untuk pengembangan desa dengan menggunakan dana desa tidak dapat terealisasi dengan maksimal apabila kepala desa tidak dapat membimbing seluruh staf desa maupun warga. Soukotta & Utami (2019).

Menurut COSO (2004) lingkungan etis pada suatu organisasi mencakup aspek tujuan organisasi, nilai-nilai dan gaya kepemimpinan untuk mencapai suatu manajemen atau gaya kepemimpinan. Pada lingkungan yang etis individu dalam organisasi cenderung untuk mengikuti peraturan dalam organisasi.

H5: Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap potensi fraud pengelolaan dana desa.

Perilaku Tidak Etis terhadap fraud pengelolaan dana desa.

Perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma social yang diterima secara umum, sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat atau yang membahayakan (Griffin dan Ebert, 2006). Wilopo (2006) menyatakan bahwa berbagai kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan Enron, WorldCom, Xerox, dan lain-lain di USA dikarenakan perilaku tidak etis manajemen perusahaan. Demikian pula CIMA (2002) dalam Wilopo (2006) berpendapat bahwa perusahaan dengan standar etika yang rendah memiliki risiko kecurangan akuntansi yang tinggi. Berbagai kajian dan penyampaian fakta, seperti oleh Beaulieu & Reinstein (2010) menunjukkan bahwa perilaku tidak etis dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, kedudukan, dan sumberdaya perusahaan, mendorong manajemen melakukan kecurangan akuntansi.

H6: Perilaku Tidak Etis berpengaruh positif terhadap fraud dana desa.

3. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan survei. Pendekatan kuantitatif dipilih dalam penelitian ini karena tujuannya adalah untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis data

dilakukan menggunakan regresi berganda, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh enam variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *convenience sampling*. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode survei. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pertanyaan secara tertulis dalam bentuk kuesioner yang dibagikan kepada perangkat desa di Kabupaten Boyolali.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

<i>One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		122
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	3,58797518
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,72
	<i>Positives</i>	0,72
	<i>Negatives</i>	-0,47
<i>Test Statistics</i>		0,72
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,195 ^c

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *probability value* yang ditunjukkan melalui *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,195 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa data residual dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

Tabel 2. Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Tekanan	0,251	3,979
Sistem Pengendalian Intern	0,624	1,603
Budaya Organisasi	0,180	5,549
Kompetensi	0,531	1,882
Gaya Kepemimpinan	0,188	5,327
Perilaku Tidak Etis	0,247	4,047

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dari keenam variabel independen masing-masing adalah 0,251; 0,624; 0,180; 0,531; 0,188 dan 0,247 yang semuanya menunjukkan angka lebih besar dari 0,01. Adapun nilai VIF yang ditunjukkan pada tabel di atas untuk masing-masing variabel adalah 3,979; 1,603; 5,549; 1,882; 5,327; 4,407 dan yang semua variabel menunjukkan angka lebih kecil dari 10. Berdasarkan angka-angka yang ditunjukkan pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independent.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

<i>Model</i>	<i>Unstandarized Coefficients</i>		<i>Standarized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>			
(Constant)	6,744	1,031		6,542	0,000
T	0,006	0,078	0,014	0,082	0,935
SPI	-0.059	0,035	-0,182	-1,702	0,091

BO	0,001	0,049	0,003	0,015	0,988
K	-0,058	0,030	-0,223	-1,931	0,056
GK	0,038	0,054	0,138	0,711	0,478
PTE	-0,143	0,083	-0,292	-1,723	0,088

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *probability value* yang ditunjukkan melalui kolom *Sig.* dari masing-masing variabel independent semuanya lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas, data uji heteroskedastisitasnya telah terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,481	1,849		1,341	0,182
T	1,091	0,140	0,410	7,770	0,000
SPI	-0,135	0,062	-0,073	-2,172	0,032
BO	-0,021	0,089	-0,015	-0,233	0,816
K	-0,108	0,053	-0,073	-2,024	0,045
GK	0,134	0,097	0,084	1,379	0,170
PTE	1,693	0,149	0,604	11,352	0,000

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut: $F = 2,481 + 1,091T - 0,135SPI - 0,021BO - 0,108K + 0,314GK + 1,693PTE + e$

- Konstanta (α), Koefisien konstanta sebesar 2,481 menunjukkan arti bahwa apabila variabel independen diasumsikan bernilai 0, maka nilai potensi *fraud* dana desa secara konstan sebesar 2,481
- Koefisien regresi variabel tekanan sebesar 1,091 menunjukkan arah pengaruh yang positif, berarti apabila variabel tekanan ditingkatkan, maka akan meningkatkan potensi *fraud* dana desa.
- Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal sebesar -0,135 menunjukkan arah pengaruh yang negatif, berarti apabila variabel sistem pengendalian internal meningkat maka potensi *fraud* dana desa akan menurun.
- Koefisien regresi variabel budaya organisasi sebesar -0,021 menunjukkan arah pengaruh yang negatif, berarti apabila variabel budaya organisasi ditingkatkan maka potensi *fraud* dana desa akan menurun.
- Koefisien regresi variabel kompetensi sebesar -0,108 menunjukkan arah pengaruh yang negatif, berarti apabila variabel kompetensi ditingkatkan maka potensi *fraud* dana desa akan menurun.
- Koefisien regresi variabel gaya epemimpinan sebesar 0,314 menunjukkan arah pengaruh yang positif, berarti bahwa apabila variabel gaya kepemimpinan meningkat, maka akan meningkatkan potensi *fraud* dana desa.
- Koefisien regresi variabel perilaku tidak etis sebesar 1,693 menunjukkan arah pengaruh yang positif, berarti bahwa apabila variabel perilaku tidak etis meningkat, maka akan meningkatkan potensi *fraud* dana desa.

Hasil Ketetapan Model

Tabel 5. Uji Ketepatan Model

<i>R</i>	<i>R</i> ²		<i>Adjusted R</i> ²	<i>F</i> _{hitung}	<i>Sig.</i>
0,959	0,920		0,915	218,996	0,000

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan melalui penjelasan di bawah ini.

a. Uji F

Berdasarkan hasil uji F terlihat dalam Tabel bahwa model sudah layak. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai besaran *F*hitung dengan *F*tabel dan melihat nilai signifikansi *F*-nya. Dalam model regresi berganda dapat dilihat *sig F* nya 0,000 ($0,000 < 0,05$) sedangkan *F*hitung sebesar 218,996 lebih besar dari *F*tabel sebesar maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji Koefisien Determinasi (*R*²)

Uji koefisien determinasi (*R*²) ini digunakan untuk menguji *goodness-fit* model regresi. Koefisien determinasi (*R*²) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Pada Tabel 4.13 menunjukkan besarnya nilai *R* sebesar 0,959, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai *R Square* model penelitian ini sebesar 0,920. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 92%. Sementara itu, sisanya sebesar 8% dipengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor lain di luar model yang diteliti.

Hasil Uji Hipotesis

- Tekanan memiliki nilai *t*_{hitung} sebesar 7,770 lebih besar dari *t*_{tabel} sebesar 1,9808 (*t*_{hitung} 7,770 > *t*_{tabel} 1,981) dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap potensi fraud dana desa.
- Sistem pengendalian intern memiliki nilai *t*_{hitung} sebesar -2,172 lebih kecil dari *t*_{tabel} sebesar 1,9808 (*t*_{hitung} -2,172 > *t*_{tabel} 1,981) dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05 ($0,032 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negative signifikan terhadap potensi fraud dana desa.
- Budaya organisasi memiliki nilai *t*_{hitung} sebesar -0,233 lebih kecil dari *t*_{tabel} sebesar 1,981 (*t*_{hitung} -0,233 > *t*_{tabel} 1,981) dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,816 lebih besar dari 0,05 ($0,816 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi fraud dana desa.
- Kompetensi memiliki nilai *t*_{hitung} sebesar -2,024 lebih kecil dari *t*_{tabel} sebesar 1,981 (*t*_{hitung} -2,024 > *t*_{tabel} 1,981) dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05 ($0,045 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh negative signifikan terhadap potensi fraud dana desa.
- Gaya kepemimpinan memiliki nilai *t*_{hitung} sebesar 1,379 lebih kecil dari *t*_{tabel} sebesar 1,981 (*t*_{hitung} 1,379 > *t*_{tabel} 1,981) dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,170 lebih besar dari 0,05 ($0,170 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap potensi fraud dana desa.
- Perilaku tidak etis memiliki nilai *t*_{hitung} sebesar 11,352 lebih besar dari *t*_{tabel} sebesar 1,981 (*t*_{hitung} 11,352 > *t*_{tabel} 1,981) dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari

0,05 ($11,352 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap potensi *fraud* dana desa.

4.2 Pembahasan

a. Pengaruh Tekanan terhadap Potensi *Fraud* pada Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa tekanan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kecurangan pengelolaan dana desa. Menurut Cressey dalam Theodorus M. (2018) menyimpulkan bahwa tekanan sebagai masalah keuangan seseorang yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *perceived nonshareable financial need*. Cressey juga menjelaskan bahwa terdapat masalah non-keuangan tertentu yang dapat diselesaikan dengan mencuri uang atau aset lainnya, jadi dengan melanggar kepercayaan yang terkait dengan kedudukannya. *Pressure* atau tekanan dapat terjadi ketika suatu pihak terkait baik karyawan atau manajemen ingin menyembunyikan kecurangan yang mereka lakukan yang diakibatkan adanya tekanan baik dari faktor financial maupun non-financial (Mulya et al., 2019; Skousen et al., 2009). Hal ini berarti semakin besar tekanan yang diterima oleh seorang pegawai maka tindakan untuk melakukan *fraud* juga akan semakin tinggi. Seorang pegawai akan memutuskan untuk berperilaku curang (*fraud*) karena adanya desakan baik dari diri pribadi, organisasi, maupun dari luar. Lasefrina dan Novita (2023) dalam penelitiannya, bahwa tekanan dapat dijelaskan sebagai motivasi yang menggerakkan individu untuk melakukan perilaku kecurangan.

b. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Potensi *Fraud* pada Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi tindak kecurangan pada pengelolaan dana desa. Yang berarti semakin efektif sistem pengendalian internal dilaksanakan, maka dapat meminimalisir terjadinya perilaku kecurangan. Sistem pengendalian internal yang baik diharapkan dapat mengurangi adanya peluang dari praktik menyimpang yang dapat dilakukan di lingkup organisasi. Pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi dalam pengendalian kegiatan operasional untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian internal sangat berperan penting dalam keberlangsungan suatu organisasi. Kesempatan (*opportunity*) dalam *fraud hexagon theory* dijelaskan bahwa kecurangan rentan terjadi apabila terdapat peluang yang ada. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik dan efektif akan dapat mengurangi dan memperkecil peluang seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.

Dalam COSO (2013) disebutkan bahwa sistem pengendalian internal dapat mengalami kegagalan, pengendalian internal tidak mengintervensi atas adanya penilaian atau pengambilan keputusan yang buruk yang dapat menyebabkan organisasi gagal mencapai tujuan operasionalnya. Sejalan dengan Salin et al. (2018) dalam tulisannya tentang “The Impact of Weak Internal Controls on Fraud” mengungkapkan ada tiga hal yang menjadi keterbatasan pengendalian internal yaitu: keterbatasan penilaian manusia yang berkaitan erat dengan pengambilan keputusan dan dapat berakibat pada kesalahan, adanya kerusakan atau gangguan pada pengendalian internal, dan manajemen yang mengesampingkan aspek pengendalian internal untuk keuntungan pribadi karena merasa sebagai pihak yang memiliki kekuasaan. Hasil pada penelitian ini didukung oleh penelitian Handi et al. (2021) dan Adhivinna & Agustin (2021) yang mengemukakan bahwa pengendalian internal tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan akuntansi pada pengelolaan Dana Desa. Mereka menambahkan bahwa potensi kecurangan dapat timbul dari faktor internal individu, seperti sikap para aparatur desa yang berperan sebagai roda penggerak sebuah sistem pengendalian internal itu sendiri. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Desviana et al.

(2020), S. P. Sari et al. (2020), dan Basri et al. (2021) yang menyatakan bahwa keefektifan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada pengelolaan keuangan desa yang berarti potensi kecurangan akan semakin besar seiring lemahnya penerapan pengendalian internal. Selain itu, Sari et al. (2019) dan Mulyanto et al. (2021) menyatakan hal berbeda karena pada penelitiannya variabel pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap potensi kecurangan Dana Desa yang berarti pengendalian internal telah mampu diikuti dengan baik sehingga aparatur desa bekerja dengan penuh tanggung jawab. Akan tetapi peningkatan pada potensi kecurangan terhadap Dana Desa masih tetap terjadi.

c. Pengaruh Sistem Budaya Organisasi terhadap Potensi *Fraud* pada Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi tindak kecurangan pengelolaan dana desa. Jika dilihat dari para pelaku *fraud*, sebagian besar tersangka korupsi berasal dari kalangan menengah keatas. Fenomena tersebut disebabkan para pejabat memiliki tuntutan gaya hidup yang mewah. Sehingga menuntut individu untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*), sementara hasil penelitian menunjukkan bahwa di Boyolali kondisi kerja sudah baik, maka tidak ada tuntutan atau tidak pernah terfikir untuk melakukan *fraud*. Kondisi ini membuat budaya organisasi tidak terlalu memberikan dampak yang nyata pada tingkat *fraud* yang terjadi. Artinya, budaya organisasi bukan variabel yang bisa menjelaskan *fraud*.

Budaya yang tidak baik akan membuka peluang kecurangan karena sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi tidak memiliki rasa tanggung jawab atas organisasi itu sendiri dan tindak kecurangan sudah dijadikan hal yang normal sehingga pegawai merasionalisasi perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan. Sebaliknya, budaya yang baik secara tidak langsung akan berpengaruh sikap pegawai dan bahkan menjadi acuan dalam bekerja. Hal ini sangat penting untuk mendorong pegawai paham akan standar etika yang ada dan memiliki komitmen tinggi dalam menerapkannya. Hasil pada penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Agustina (2019) dan Indrapraja et al. (2021) yang berpendapat jika hasil penelitiannya sesuai dengan teori fraud yang ada, yakni budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap kecurangan. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian S. P. Sari et al. (2020), Maulana (2020), dan Basri et al. (2021) yang mengungkapkan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap potensi kecurangan akuntansi pada pengelolaan Dana Desa, artinya semakin baik nilai dari Budaya Organisasi maka potensi kecurangan akan menurun. Namun, ternyata hasil penelitian ini sejalan dengan Desviana et al. (2020), dan Mulyanto et al. (2021) yang mengemukakan bahwa budaya organisasi tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan akuntansi pada pengelolaan Dana Desa, artinya bagaimanapun kondisi budaya organisasinya tidak dapat meminimalisir atau meningkatkan kecurangan. Hal ini terjadi karena potensi kecurangan dapat timbul dari banyak faktor lainnya, seperti adanya intervensi dari pimpinan atau pihak lain untuk berbuat curang.

d. Pengaruh Kompetensi terhadap Potensi *Fraud* pada Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi tindak kecurangan pengelolaan dana desa. tingkat pendidikan rendah yang dimiliki oleh aparatur desa menjadi hambatan dalam mengelola keuangan desa sehingga berpotensi terjadinya kecurangan (*fraud*). Secara keseluruhan, aparatur desa yang memiliki kompetensi tinggi dalam pekerjaannya diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal demi tercapainya tujuan organisasi. Bahkan, individu yang dianggap memiliki kemampuan lebih sering dipercaya menempati posisi strategis, seperti menjadi pimpinan dalam suatu organisasi. Namun demikian, Putra dan Rahayu (2019) menyatakan bahwa jabatan tertentu dapat mendorong seseorang untuk bertindak menyimpang. Hal ini sejalan dengan pendapat James A.

Hall (2011) yang menyebutkan bahwa posisi dalam organisasi dapat membuka peluang bagi individu untuk melakukan kecurangan. ACFE (2022) juga melaporkan bahwa salah satu ciri perilaku curang adalah memiliki sifat yang manipulatif atau “licik”. Selain itu, persepsi masyarakat juga memperkuat pandangan bahwa korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Data ICW (2022) turut menunjukkan bahwa kepala desa merupakan pelaku korupsi terbanyak ketiga, dengan 159 orang (13,5%) dari total 1.173 tersangka kasus korupsi sepanjang tahun 2021. Padahal, aparatur desa yang kompeten seharusnya terdorong untuk memanfaatkan kemampuannya dalam mengelola Dana Desa secara bertanggung jawab, bukan justru menyalahgunakannya hingga merugikan pemerintah desa dan masyarakat.

Penelitian ini tidak selaras Suryandari & Pratama (2021) dan S. P. Sari et al. (2020) yang mengemukakan bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan, disebabkan karena para aparatur desa menggunakan kemampuannya sebagai modal utama dalam mewujudkan sebuah tindakan kecurangan. Semakin ahli seorang aparatur desa dalam mengerjakan tugasnya maka semakin besar potensi aparatur desa tersebut mengetahui celah, cara dan kelemahan tertentu sehingga akhirnya mampu dan berhasil melakukan tindak kecurangan. Namun, temuan pada penelitian ini selaras dengan penelitian (Desviana et al., 2020) dan (Basri, 2021) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pada pengelolaan Dana Desa yang berarti kecenderungan kecurangan akan semakin kecil ketika semakin kompeten seorang aparatur desa dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, penelitian Maulana (2020) dan Dila Rosalina (2020) mengemukakan hal yang berbeda, yakni pada penelitian mereka diungkapkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan Dana Desa.

e. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Potensi *Fraud* pada Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, gaya kepemimpinan menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Gaya kepemimpinan yang diterapkan di masing-masing kantor desa di Boyolali sudah dalam di tahap baik, yang artinya Kepala Desa sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa sudah berperan secara efektif dalam merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, dan menentukan arah dan tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan mengintegrasikan karyawan dalam kepemimpinannya agar dapat berbuat sesuai dengan kemauan pimpinannya untuk mencapai tujuan organisasi (Saputra, 2019). berdasarkan teori agensi, gaya kepemimpinan tidak disepakati antara pegawai dengan pemimpinnya. Gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin dapat dipengaruhi oleh moral seorang pemimpin itu sendiri. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eldayanti et al., (2020) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

f. Pengaruh Perilaku Tidak Etis terhadap Potensi *Fraud* pada Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku tidak etis memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Ini berarti semakin tinggi tingkat perilaku yang tidak etis akan meningkatkan juga tingkat kecurangan yang terjadi. Penelitian ini sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Basri et. al, (2021) yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi simultan (uji t) serta dilakukannya pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Tekanan memiliki pengaruh positif terhadap potensi *fraud* dana desa.

- b. Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap potensi *fraud* dana desa.
- c. Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* dana desa.
- d. Kompetensi memiliki pengaruh negatif terhadap potensi *fraud* dana desa.
- e. Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap potensi *fraud* dana desa.
- f. Perilaku tidak etis memiliki pengaruh positif terhadap potensi *fraud* dana desa.

Saran dan Keterbatasan

Penelitian ini tidak luput dari keterbatasan. Penelitian ini dilakukan hanya di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Boyolali, sehingga hasil penelitian ini lebih menggambarkan situasi secara lokal, penelitian selanjutnya akan lebih baik menggunakan data populasi yang luas, tidak hanya mencakup satu kabupaten saja, sehingga kesimpulannya bisa digunakan jika ditujukan untuk populasi yang luas. Penelitian ini murni dilakukan dengan metode survei dan belum dilengkapi dengan metode wawancara sehingga kemungkinan jawaban responden belum sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan metode melalui kuesioner, tetapi juga dengan melakukan wawancara langsung kepada responden sehingga hasil yang didapat lebih akurat dan lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V., Selawati, M., & Umam, M. S. (2022). Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 63–74. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i2.138>
- Alwindria, Y., Taufik, T., & Azlina, N. (2020). Analisis Transparansi Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018). *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 3(2), 120–143. <https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.49>
- Anggrima Wati, N. P. A. M., & Yuniasih, N. W. (2021). Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Etis Manajemen Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 117–138. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1804>
- Anggun Rahma Juita, W., & Hariri, dan. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukabanjar Lampung. *E-Jra*, 11(07), 90–101.
- Apriani, U. (2020). Pengaruh Komponen-Komponen Fraud Star Terhadap Korupsi Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Sip) Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 1–24. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6311>
- Aziiz, N. M., dan Prastiti, D. S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Basri, Y. M. (2021). Analisis Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Fraud Hexagon. *May*. <https://doi.org/10.21632/saki.3.1.50-73>
- Briando, B., Triuwono, I., & Irianto, G. (2020). Etika profetik bagi pengelola keuangan negara. *Etika Profetik Bagi Pengelola Keuangan Negara*, 10(4), 342–364. <https://doi.org/10.52893/peneleh.2020.15.bb.dkk>

- Budiarto, D. S., & Zulaika, I. N. (2022). Which One Is More Important: Internal Control System or Financial Report Accessibility? *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(3), 162–172. <https://doi.org/10.33508/jako.v14i3.3731>
- Dali, N., Safaruddin, & Yulistina, H. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 142–153. <https://doi.org/10.33772/jakuho.v10i1.249>
- Desviana, D., Basri, Y. M., & Nasrizal, N. (2020). Analisis Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Fraud Hexagon. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 50–73. <https://doi.org/10.21632/saki.3.1.50-73>
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Donelson, D., Ege, M., & McInnis, J. (2017). Internal Control Weaknesses and Financial Reporting Fraud. *Auditing*, 36, 45–69. <https://doi.org/10.2308/ajpt-51608>
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 465–494. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.787>
- Erika, N. W., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2022). 2282-Article Text-5923-1-10-20220125. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 48–64.
- Faradiza, S. A. (2019). EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Sekar Akrom Faradiza. *Fraud Pentagon Dan Kecurangan Laporan Keuangan*, 2(1), 1–22.
- Haerunisa, Askandar, N. S., & Junaidi. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Studi Pada TBBM. PT Pertamina (persero) Di Kota Malang. *E-Jra*, 10(2), 70–80.
- Inna, I. Z., & Sulistiyantoro, D. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Informasi Desa, Kompetensi Ap Ara Tur Desa, Sistem Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Lnformasi, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 185–199. <https://doi.org/10.25139/jaap.v7i2.6243>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kalau, A. A., & Leksair, S. (2020). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Di Ambon). *Jurnal Cita Ekonomika*, 14(2), 99–110. <https://doi.org/10.51125/citaekonomika.v14i2.2728>
- Menurut, P., Kelamin, J., Jurusan, M., Ekonomi, I., Ekonomi, F., & Riau, U. (2020). *Email : indramaikaputra@yahoo.com JOM FEB , Volume 7 Edisi 2 (Juli – Desember 2020)*. 7, 1–15.

- Oktavia, R., Alvia, L., & Octary, A. D. (2023). Pengaruh Kompetensi Dan Tekanan Finansial Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 28(2), 206–218. <https://doi.org/10.23960/jak.v28i2.1966>
- Organisasi, P. B., Tidak, P., & Dan, E. (2022). *Pulang Pisau*. 14(2), 79–91.
- Putra, M. A., & Rahayu, N. T. (2019). Analisis Fraud Diamond Theory Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 2, 240–248. <http://prosiding.unimus.ac.id>
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Saraswati, K. N., & Purnamawati, I. G. . (2022). Pengaruh Locus of Control, Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Penerimaan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Bulelen. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(1), 284–294. <https://repo.undiksha.ac.id/8719/>
- Soukotta, V., & Utami, I. (2019). Apakah Gaya Kepemimpinan Mendukung Potensi Pengungkapan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa ? *Jurnal Online Insan Akuntan*, 4(2), 223–238.
- Sudibyo, T. D. (2020). Influence of Leadership Style To Fraud (Case Study on Procurement of Goods in Pt Kaltim Industrial Estate). *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 8(1), 79–93.
- Sumbayak, J. S. (2017). Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecurangan (Fraud). *JOM (Jurnal Online Mahasiswa) Fakultas Ekonomi*, 4(1), 3168–3182.
- Suryandari, E., & Valentin, L. (2021). *Determinan Fraud Dana Desa : Pengujian Elemen Fraud Hexagon , Machiavellian , dan Love of Money*. 5(1), 55–78. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11688>
- Yuliani, P., Ardini, L., & Kurnia, K. (2024). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Fraud Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai. *Jurnal Manajerial*, 11(01), 134. <https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v11i01.7017>